



Agresi Militer Belanda di Wilayah Batu Pujon 1947-1948: Sebuah Kajian Sejarah Lokal

Moch. Dimas Galuh Mahardika^{1*}

*Corresponding email Author : dimas.dg20@gmail.com

¹Departement of History Education, Sebelas Maret University.

Abstrak: Peristiwa yang menandai periode 1945-1950 adalah Agresi Militer I dan II oleh pemerintah Belanda dengan mengerahkan berbagai divisi militer sebagai upaya merebut kembali tanah jajahan. Keinginan besar Belanda untuk mendapatkan kekuasaan kembali atas Indonesia setelah proklamasi merupakan salah satu bentuk ancaman nyata yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dengan dalih “Aksi Polisionil” tentara Belanda melakukan aktifitas militer di wilayah Indonesia, sekaligus melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Gejolak di berbagai daerah mulai muncul, salah satunya terjadi di wilayah Batu-Pujon. Monumen status quo lijn di daerah Pujon menjadi simbol batas pendudukan Belanda dan wilayah Republik. Pertempuran yang terjadi di wilayah Batu-Pujon merupakan salah satu dari sekian banyak pertempuran yang terjadi selama periode Agresi Militer. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian sejarah untuk menceritakan peristiwa Agresi Militer Belanda dalam konteks sejarah lokal wilayah Batu- Pujon.

Kata Kunci: Agresi, Militer, Belanda, Batu, Pujon, TNI.

Dutch Military Agression in Batu-Pujon East Java 1947-1948: A Local History

Abstract: *One of the events marking the period 1945-1950 was the Military Aggression I and II which deployed many military divisions in an effort to fight for independence in the regions. The Dutch's great desire to regain control of Indonesia after the proclamation is one form of real threat that must again be faced by the Indonesian nation. Under the pretext of “Police Action”, the Dutch soldiers carried out military activities while violating a previously agreed agreement. Turmoil in various regions began to appear, one of them in the Batu-Pujon region which is one of the highlands and flanked by several mountains. The status quo monument in Pandesari area became a symbol of the boundaries of dutch occupation and Republic territory. The battle that took place in the Batu-Pujon region was a small battle that took place during the Military Aggression. This article written by using the historical research methods try to explain the history of Dutch Military Agression in the local history context of Batu-Pujon region.*

Keywords: *Aggression, Batu, Pujon, Indonesian, National, Army.*

PENDAHULUAN

Sejarah adalah peristiwa yang terjadi sekali, unik dan menyangkut kehidupan banyak orang. Carr (2018) bahkan mengatakan bahwa sejarah adalah peristiwa nyata. Menggarisbawahi kata "peristiwa", adalah sesuatu yang dianggap tidak selalu melekat pada peristiwa itu sendiri, melainkan tentang nilai yang diarahkan pada acara tersebut. Begitu sering sejarawan memeriksa peristiwa sejarah sebagai makna. Dimana maknanya diyakini penting untuk direkonstruksi melalui fakta-fakta sejarah yang dapat melahirkan fakta baru. Fakta sejarah diperoleh dari peristiwa yang bersifat sejarah nasional atau nasional dan dapat dipelajari secara mendalam tentang peristiwa sejarah lokal atau lokal. Sejarah nasional lebih banyak tentang peristiwa nasional atau sejarah Indonesia pada umumnya. Sementara dalam sejarah wilayah atau sejarah lokal, pola studi sejarah dipelajari lebih dalam mengenai wilayah administratif seperti kabupaten dan provinsi. Selain itu, sejarah lokal juga bisa menjadi kontributor yang jelas bagi sejarah nasional. Karena sejarah lokal tergantung pada lingkup geografisnya (Abdullah, 1985).

Studi sejarah lokal di Indonesia memiliki empat pola, yaitu: 1) studi yang berfokus pada peristiwa tertentu, 2) studi yang mengedepankan struktur, 3) studi yang mengambil pengembangan berbagai aspek tertentu dan dalam jangka waktu tertentu 4) Studi yang menceritakan pengembangan daerah tertentu (Abdullah, 1985; Amato, 2002). Pola ini ditemukan pada periode 1945-1950 yang dianggap sebagai periode paling penting dalam sejarah bangsa. Karena pada periode itu rakyat berjuang habis-habisan dalam mencapai kemerdekaan, bahkan mempertahankan kemerdekaan itu dari tangan penjajah.

Salah satu peristiwa lokal yang menandai periode 1945-1950 adalah Agresi Militer I dan II yang mengerahkan banyak divisi militer dalam upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan di wilayah tersebut (Drakeley, 2005; Nasution, 1977). Agresi dilakukan oleh Belanda sebagai upaya untuk merebut kembali daerah yang sebelumnya pernah dikuasai, khususnya daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, terutama minyak. Tetapi untuk menutupi niat ini di mata masyarakat internasional, Belanda menyebut Agresi sebagai tindakan 'polisionil', dan menyatakan bahwa tindakan ini sebagai persoalan internal. Gubernur Jenderal Belanda, Dr. H. J. van Mook menyampaikan pidato di sebuah radio dengan menyampaikan bahwa Belanda tidak lagi terikat oleh perjanjian Linggarjati. Saat itu jumlah pasukan Belanda telah mencapai angka lebih dari 100.000 orang yang dibekali persenjataan

modern, termasuk persenjataan barat yang disediakan oleh pihak Inggris dan Australia (Scagliola, 2007; Vickers, 2005; Yusuf, 2016).

Secara kronologis, peristiwa Agresi Militer oleh Belanda mendapat perlawanan dari pemerintah, karena pada tanggal 15 Juli 1947, van Mook memberikan ultimatum kepada Republik Indonesia untuk menarik pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Tentu saja Pemerintah Indonesia menolak permintaan Belanda ini, sehingga ada strategi militer dari daerah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Agresi militer adalah salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, periode pasca-kemerdekaan. Acara ini dimulai pada pertengahan 1947, tepatnya pada 21 Juli-5 Agustus 1947. Tindakan ini merupakan salah satu upaya Belanda untuk mengamankan faktor produksi yang pernah diduduki oleh Jepang di masa lalu, atau disebut sebagai tindakan polisi. Namun bagi bangsa Indonesia, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati. Atas tindakan ini, respon internasional cukup represif sehingga pada tanggal 30 Juli 1947 Pemerintah India dan Australia membuat permintaan secara resmi agar masalah Indonesia segera masuk dalam daftar agenda Dewan Keamanan (Djamhari, 2010; Nopyansyah dkk., 2018; van der kroef, 1953).

Aksi Belanda tersebut mendapat beberapa tanggapan dari masyarakat internasional, seperti sikap yang ditunjukkan Amerika Serikat dan Inggris yang tidak menyetujui aksi sepihak ini dan memberikan pesan kepada Belanda agar segera menghentikan tindakan tersebut. PBB juga terlibat aktif dalam penyelesaian konflik ini, yang selanjutnya akan menempatkan Belanda dalam kesulitan posisi diplomatik. India, Australia, dan Uni Soviet juga sangat menentang tindakan Belanda (de Leeuw, 2015). Menurut sebuah panggilan dari PBB, pada akhir Juli 1947 Belanda menyetujui gencatan senjata. Selanjutnya PBB mengizinkan Sjahrir untuk berbicara atas nama Republik, tetapi ia tidak bersedia menerima perwakilan dari daerah yang sedang dikuasai Belanda. Pada bulan Oktober, Komite Layanan Jasa Baik PBB yang terdiri dari Perwakilan Amerika Serikat, Australia dan Belgia dibentuk untuk membantu negosiasi Belanda-Indonesia untuk gencatan senjata (Ricklefs, 2007). Sementara negosiasi sedang berlangsung, pihak Belanda mencoba untuk terus mengoyak dengan membentuk beberapa negara boneka. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya menyelenggarakan Konferensi Jawa Barat II diselenggarakan di Bandung 16-19 Desember 1947 untuk menentukan status Jawa Barat. Konferensi ini

ditentang oleh masyarakat Jawa Barat sendiri. Masyarakat Jawa Barat dengan tegas menyatakan bahwa wilayah Jawa Barat merupakan bagian dari NKRI dan statusnya boleh dapat dipisahkan dari NKRI. Di sisi lain, Belanda juga membentuk Komite Indonesia Amerika Serikat seperti yang disampaikan oleh Dr. Beel pada tanggal 19 Desember 1947 yang kemudian membentuk "negara" Sumatera Timur (Anwar, 2010; Djamhari, 2010; Farram, 2020)

Awal tahun 1948, kesepakatan baru dicapai antara Belanda dan Indonesia, yang dikenal sebagai perjanjian Renville, karena negosiasi dilakukan di atas kapal USS Renville di Jakarta. Perjanjian tersebut mengakui gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut sebagai "Garis Demarkasi Van Mook", sebuah garis buatan yang menghubungkan titik-titik utama pihak Belanda meskipun fakta bahwa masih ada banyak daerah yang dikuasai republik di belakangnya (Efimova, 1998; Ricklefs, 2007). Setelah penandatanganan perjanjian Renville, Amir Sjarifuddin melepaskan jabatannya sebagai perdana menteri dan diikuti oleh anggota kabinet dan partai-partai besar (PNI, Masyumi). Jatuhnya Amir Sjarifuddin menandakan kekecewaan besar bahwa Indonesia harus kembali bernegosiasi dengan "pencuri" di dalam negeri.

Belanda terus berupaya membuat negeri wayang di beberapa daerah yang telah dikuasai, seperti negara Sumatera Timur, Madura, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur dan sebagainya hingga 15 daerah ditangkap. Pada bulan Juli, Belanda secara singkat membentuk Majelis Konsultatif Federal, di mana ada para pemimpin negara-negara federal. Tujuan pembentukan majelis ini adalah untuk membentuk Negara Indonesia Amerika Serikat dalam bentuk federal. Tetapi beberapa elit pro-republik berpikir bahwa federalisasi ini tidak akan berhasil karena tidak mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Oleh karena itu, Belanda melangkah lebih jauh mempertimbangkan penyelesaian militer akhir (Frakking, 2017; Vickers, 2005).

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan metode historiografi yang diimplementasikan dalam empat tahap (Gottschalk, 1969; Kuntowijoyo, 2005) yaitu pertama, penentuan topik. Penulis memilih topik pada interval waktu 1950-an dengan diskusi khusus terkait Agresi Militer Belanda di Wilayah Batu-Pujon dari tahun 1947 hingga 1948.; *Kedua*, pengumpulan sumber

yaitu Sumber yang digunakan dalam artikel ini adalah sumber sekunder dalam bentuk buku, dan jurnal ilmiah sesuai dengan diskusi yang relevan dengan judul yang terkandung dalam artikel ini; *ketiga*, verifikasi sumber yaitu Sumber daya yang dikumpulkan kemudian dipelajari untuk menentukan validitas informasi yang terkandung di dalamnya. Sumber dalam bentuk jurnal ilmiah dan buku dapat dipertanggungjawabkan secara akademis; *keempat*, interpretasi yaitu penulis memeriksa dari berbagai sumber yang telah diperoleh untuk menemukan fakta dan merangkai mereka bersama-sama dalam bentuk narasi dan *kelima*, historiografi yaitu Hasil kajian dan interpretasi kemudian ditulis dalam bentuk narasi sesuai dengan sistematika dan tata cara penulisan artikel yang telah ditentukan.

Serangkaian proses dalam menulis artikel ini menggunakan metode prosedural yang telah disepakati sebagai metode penelitian historis untuk mengetahui peristiwa masa lalu secara akademis (Gottschalk, 1969; Schaff, 1976) khususnya diskusi yang berkaitan dengan topik utama ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis Wilayah Batu-Pujon

Kondisi geografis wilayah Batu merupakan bagian dari "Dataran Tinggi Malang". Fitur geologi utamanya adalah adanya endapan lava dan tanah liat hitam. Ini menunjukkan bahwa dataran adalah bekas aliran lava, yang kemudian membentuk danau kuno. Ini sangat masuk akal karena daerah Batu diapit oleh pegunungan di sisi utara, barat dan selatan dari serangkaian gunung. Jika diurutkan dari sisi utara ada Gunung Arjuno-Welirang, di sisi barat terdapat gunung Anjasmoro dan Panderman, dan sisi selatan masih lereng Gunung Panderman. Di sebelah timur tidak ada gunung seperti di sisi lain, jika ada dua gunung tinggi di timur yaitu Tengger dan Semeru, namun kedua gunung tersebut sudah masuk ke wilayah Kabupaten Malang (Cahyono, 2011).

Kawasan Batu merupakan daerah yang produktif, karena memiliki kualitas tanah yang tinggi dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Selama masa kolonial Belanda, tepatnya setelah diberlakukannya cultuurstelsel dan kebijakan Ekonomi Liberal pada tahun 1870, kawasan Batu dikenal sebagai pusat perkebunan dengan komoditas tanaman berkualitas ekspor. Pengusaha Belanda dan Tionghoa mulai membuka area perkebunan di sub-wilayah utara sungai Brantas, di wilayah ini cukup banyak mata air yang dialirkan oleh dua sungai

besar (Brantas dan Kali Lanang). Di kawasan tersebut dibuka area perkebunan dengan komoditas kopi, teh, kina, kakao dan bunga. Setelah kolonialisme Belanda di beberapa wilayah Batu, tepatnya di sekitar lereng Pandoman yang kini dikenal dengan sebutan Embong Kembar, Stadion Brantas, hingga kawasan wisata Agro Kusuma merupakan area perkebunan kopi. Selain memiliki tanah yang subur, daerah Batu di dataran tinggi Malang terkenal dengan iklimnya yang sejuk sehingga orang Eropa memberikan istilah *de klein Swizzerland* (Swiss kecil). Julukan ini disematkan ke wilayah Batu karena memiliki iklim yang mirip dengan Swiss (Achmad, 2019; Sulistyio dkk., 2019).

Selama revolusi pasca kemerdekaan, wilayah Batu juga tidak luput dari invasi tentara Belanda. Brigade Infanteri KNIL Belanda yang berbasis di Surabaya berhasil menembus garis pertahanan Divisi VII (Untung Suropati) di Porong yang kemudian bergerak ke selatan ke Gempol, Pandaan dan Lawang untuk memasuki wilayah Malang. Ada tiga rute invasi pasukan Belanda ke daerah Batu, di antaranya di jalur utara: 1) Porong-Pacet-Batu, dan di rute timur 2) Porong-Karangploso-Batu, dan 3) Kota Malang-Batu (Cahyono, 2011). Mengingat medan pegunungan yang cukup sulit dilalui, pasukan Belanda mengguncang daerah Batu pada 30 Juli 1947. Untuk menangani invasi dari utara, para pejuang memfokuskan penghalang jalan di Batu utara.

Agresi Militer Belanda di Wilayah Batu-Pujon 1947-1948

Kondisi politik di negeri Belanda juga menjadi salah satu penyebab awal Agresi militer Belanda. Pada tanggal 6 Agustus 1948, Dr. Willem Drees dilantik menjadi Perdana Menteri kabinet koalisi dengan Partai Katolik. Ia menggantikan posisi Dr. L. J.M. Beel yang diangkat menjadi *Hooge Vertegenwoordiger van de Kroon* (Deputy High Crown) dari Belanda di Indonesia. Beel menggantikan Van Mook yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Jenderal. Dr. Beel adalah pengusaha garis keras Belanda yang tidak ingin memberikan konsesi kepada Indonesia. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sikap Profesor Schermerhorn yang sosialis. Penunjukan Beel membuat semakin bersikap keras, dan hal ini menjadi keuntungan bagi Letnan Jenderal Spoor yang berkepentingan untuk menghancurkan TNI. Seperti halnya ketika perjanjian Belanda mengkhianati hasil perjanjian Linggarjati yang kemudian memunculkan Agresi Militer I dan perjanjian Renville di kemudian hari (Groen, 1986; Krekhof, 2005). Perjanjian Renville diselenggarakan pada

Januari 1948 di atas geladak kapal Amerika 'USS Renville' yang bertempat di pelabuhan Jakarta. Perjanjian itu berisi kesepakatan tentang gencatan senjata di sepanjang Jalur Van Mook. Garis Van Mook adalah garis buatan yang menghubungkan titik-titik utama dari sisi Belanda, meskipun pada kenyataannya masih terdapat banyak daerah yang dikendalikan partai Republik (Wiebes & Zeeman, 1992).

Sengketa teritorial berada di balik jalannya rencana agresi ke suatu wilayah di Indonesia ini dimulai dengan penolakan Partai Republik terhadap tuntutan Belanda untuk pengembalian kekuasaan Perwakilan Tinggi Kerajaan Belanda selama periode pemerintah federal. Sementara itu, sebelum penyerahan kedaulatan, Belanda menuntut agar Perwakilan Tinggi memiliki hak untuk mengirim pasukan atas keputusannya sendiri ke daerah-daerah. Setelah perjanjian Renville, garis demarkasi didirikan yang memisahkan wilayah Indonesia dan Belanda. Pada garis demarkasi inilah sering terjadi pertempuran antara divisi Belanda dan militer di daerah tersebut. Aktivitas musuh yang sebenarnya dilakukan pada garis demarkasi adalah patroli aktif-regresif terus menerus. Oleh karena itu, setiap resimen regional mengerahkan hampir semua senjata untuk digunakan oleh perusahaan atau batalion yang bergantian terjun ke medan statis (Nasution, 1977). Wilayah Batu berada dalam komando batalyon II di bawah Mayor Abdul Manan.



Gambar 1. Monumen Statusquo Lijn, batas wilayah Belanda dan Republik Indonesia
Sumber : Cahyono (2011: 155)

Setelah perjanjian Renville, garis demarkasi yang ditentukan untuk memisahkan wilayah Indonesia dan Belanda, personel TNI juga harus ditarik dari wilayah yang dikuasai Belanda. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut, pada tahun 1948 KTN datang ke

Pujon untuk menentukan garis demarkasi. Titik pusat jalur demarkasi di Wilayah Pujon terletak di Desa Pandesari. Keberadaan garis status quo merupakan penengarai yang menandai pertempuran pada 7 dan 19 Desember 1948 di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon. Keputusan dari KTN diikuti dengan pendirian pos pertahanan baru dan pos Polisi Keamanan, yang dijaga di sekitar garis demarkasi. Pasukan pos terdiri atas anggota Batalyon II dan personel polisi yang dipimpin oleh Gardjito. Belanda juga membangun pos patroli di sekitar garis demarkasi. Pada tanggal 7 Desember 1948, pasukan yang dipimpin oleh Koprak Kastawi menyusup ke wilayah Belanda di pedalaman desa Pandesari. Tentara ini kemudian menyerang pos tentara Belanda yang berada di wilayah tersebut. Sekitar pukul 16:00 terjadi baku tembak antara pasukan Kastawi dan tentara Belanda yang sedang melakukan patroli. Pertempuran semakin panas ketika bantuan datang dari Kapten, sehingga mendorong pasukan Belanda untuk mundur ke wilayah Batu (Wicaksono, 2012).

Selama pertempuran, TNI berhasil menyita kendaraan berupa Jeep, telepon, beberapa topi lapis baja dan mantel, serta menewaskan beberapa orang dari tentara Belanda. Akan tetapi keberhasilan tersebut dibayar mahal dengan meninggalnya Koprak Kastawi. Pertempuran ini juga melukai Mbak Oemar, seorang warga Pandesari yang kakinya patah akibat pecahan mortir. Setelah pertempuran sengit ini, Belanda melaporkan TNI ke KTN dan meminta agar pasukan TNI mengembalikan barang-barang yang disita dari tentara Belanda. Dalam merespon hal tersebut, perwakilan KTN datang ke Pujon untuk melakukan penyelidikan. Penyidik KTN ditemui secara langsung oleh Komandan Batalyon 2 Mayor Abdul Manan dan Kepala Staf Batalyon 2 Kapten Sumitro. Berkat keahlian mereka berdua dalam bernegosiasi, KTN membatalkan sanksinya kepada TNI. Pada tanggal 17 Desember 1948, Komandan Batalyon Mayor Abdul Manan berada di Kediri untuk menghadiri upacara dan pertemuan dalam rangka menggabungkan divisi militer di Jawa Timur menjadi sebuah divisi dengan nama yang disepakati dari Divisi Brawijaya. Saat menghadiri acara tersebut Mayor Abdul Manan didampingi ajudannya dan Komandan Kompi I Kapten Semeru. Satu hari setelahnya di sore hari, komandan Batalyon dan pasukannya telah tiba kembali di markas komando batalyon wilayah Pujon (Aminullah, 2006).

Agresi Militer II dieksekusi dengan sangat rapi tetapi sulit untuk berhasil. Pada tanggal 19 Desember 1948 pagi, pasukan Belanda memperkuat pasukan di belakang garis pertahanan di sekitar wilayah Ngantang. Pasukan Belanda bermaksud untuk mengendalikan

pusat kekuasaan Mandalan. Namun, usaha tersebut tidak mudah untuk dicapai. Informasi bahwa musuh berada di belakang pertahanan TNI diperoleh dari orang-orang yang datang kepada Kapten Sumeru yang kebetulan tinggal di sekitar tempat itu. Informasi ini kemudian ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Komandan Batalyon di Pujon. Sudah menjadi tugas dalam rangka strategi bagi Perusahaan I untuk masuk ke wilayah Kawedanan Singosari. Kemudian disusun instruksi untuk melakukan aksi pencegahan. Pertama, Panglima Kompi bersama Seksi I dan III di bawah pimpinan Lettu Suwandi dan Lettu Supanggih segera masuk untuk menempati lokasi tujuan. Kedua kompi I yang dipimpin Letnan Sutomo bergerak bersama. Sembari menunggu hasil pergerakan pertama, seksi I masih berada di pangkalan sekitar daerah Tawang Sari Pujon (Cahyono, 2011).

Pada gerakan pertama Pasukan Sumeru gagal karena di daerah Junggo harus terlibat pertempuran sengit. Situasinya mungkin karena musuh sudah mengetahui rencana pergerakan pasukan TNI, sehingga musuh mempersiapkan pasukannya untuk mencepat pasukan TNI. Sementara itu, pasukan Perusahaan Sumeru kembali ke base area di Pujon dengan tujuan melakukan konsolidasi. Sedangkan Seksi Utomo diperintahkan untuk bergerak menuju area sasaran. Dalam gerakan kedua yang dipimpin oleh Komandan Seksi, beberapa anggota Polri diperkuat. Selain itu, ada juga anggota dinas dari unsur pemerintah sipil, termasuk Camat Karangploso, Suwartono. Semua pasukan pada keberangkatan ini sebanyak 130 orang. Rute yang ditempuh adalah dari pangkalan Tawang Sari melalui Wiyurejo, kemudian bergerak ke kiri melalui Bagean Borah melalui hutan untuk menghindari kemungkinan kontak dengan musuh, selama kurang lebih dua hari dua malam. Akibatnya mereka tiba di daerah Sumber Brantas. Di daerah ini, masyarakat sekitar memberikan banyak bantuan makanan, seluruh tentara beristirahat selama sehari (Utama, 2008).

Kemudian perjalanan berlanjut dan bergerak menuju Gunung Papak. Sebelum seluruh rombongan masuk ke Desa Sumberilang, seluruh pasukan siap disiapkan di sekitar desa. Untuk menyelidiki keadaan desa, beberapa orang yang sudah tahu desa ditugaskan. Ternyata seluruh warga Desa Sumberilang tetap setia kepada Pemerintah Indonesia. Bahkan dari desa ini direncanakan operasi pembersihan ke desa-desa di kecamatan Karangploso. Dengan menggunakan anggota kelompok dari unsur aparat sipil negara dan kehutanan yang mengetahui keadaan wilayah Karangploso, langsung ada hubungan dengan beberapa

kepala desa dan warga yang menurut pengamatan masih setia kepada Pemerintah Indonesia. Dari hasil hubungan ini dapat segera diketahui siapa yang masih bisa diharapkan setia kepada NKRI dan yang bekerja sama dengan musuh. Tanpa membuang waktu, kemudian diperoleh data yang cukup tentang langkah kaki tangan musuh dan para pelaku. Kemudian ditentukan oleh petugas untuk melakukan pembersihan. Selain itu, juga dijelaskan kepada seluruh masyarakat tentang ke mulianya perjuangan ini. Untuk melaksanakan tugas operasi penerangan ini, sekelompok kecil yang terdiri dari tiga orang dibentuk dengan kepemimpinan satu orang dari unsur militer.

Dalam waktu singkat hampir semua masyarakat Kecamatan Karangploso mengajukan diri untuk membantu perjuangan sesuai bidangnya masing-masing. Hasilnya, Bapak Soewartono dapat dengan mudah mengatur pemerintahan Indonesia di Karangploso, serta dapat mengadakan berbagai pertemuan kepala desa di Kecamatan Karangploso. Dalam gerakan di daerah Karangploso itu diperoleh bantuan dari Seksi Basirun (Samsun Bordir Kompi) yang saat itu terpisah dari ibu pasukannya. Untuk sementara, mereka bergabung dengan Seksi Sutomo dengan tugas menegakkan Pemerintah Indonesia di Karangploso. Setelah pemerintah Indonesia di Karangploso mulai berfungsi, pasukan siap untuk melakukan serangan terhadap pos-pos musuh yang berbasis di Pendem dengan tujuan membuktikan bahwa TNI masih memiliki kekuatan dan dapat menyerang musuh kapan saja. Selain itu, sering terjadi serangan terhadap patroli musuh menggunakan kendaraan bermotor. Semua gerakan ini dilakukan dalam kilat dan dalam kelompok kecil sehingga mereka dapat bergerak dengan lincah dan memusingkan lawan. Selama menjalankan Wingate Action sering terjadi serangan oleh musuh untuk menghancurkan pasukan TNI. Pasukan Belanda melakukan berbagai patroli ke desa-desa serta pembersihan besar-besaran dengan mengerahkan angkatan darat dan udara. Dalam operasi yang dilakukan Belanda di daerah Karangploso sekitar Februari-Maret 1949, komandan tim Kopral Sumedi di Desa Tegalondo dan seorang komandan regu Sertu Madasih ditangkap di Desa Ngijo dan ditembak mati di pos Ngroto, Pujon. Sementara seorang anggota TNI, Pratu Muchotib, meninggal dunia di Kangrengan, Karangploso.

Sementara itu, Pasukan Sumeru setelah melakukan konsolidasi di kawasan pangkalan Pujon, dalam waktu singkat juga langsung bergerak kembali menuju target awal wilayah Singosari dan Lawang. Sutomo seksi yang selama ini berada di Karangploso dihubungi.

Dengan demikian, unsur pimpinan perusahaan Sumeru berhasil ditemukan dengan tujuan untuk bersama-sama merumuskan implementasi perintah strategi batalyon. Setelah diputuskan cara bertindak mana, bagian dan kelompok staf perusahaan bergerak dalam bentuk kelompok 3-4 orang menuju area target yang telah ditentukan yang berpakaian sebagai penduduk. Seksi Sutomo terletak di daerah Karangploso, Seksi Suwandi di daerah Lawang, Seksi Supanggih di daerah Singosari, sedangkan untuk kelompok staf perusahaan berdomisili di desa Langlang dan sekitarnya (Sholihana, 2013).

Selain paparan ini, pertempuran di sekitar garis status quo kembali terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Pada saat itu, beberapa polisi keamanan berjaga-jaga di Pos di sekitar garis status quo, seorang tentara Belanda bernama Manson melakukan provokasi dengan melanggar garis status quo, bersama dengan itu, datang sejumlah besar pasukan Belanda dari Utara menyerang pos polisi di sekitar garis status quo. Polisi keamanan dan TNI yang menjaga posko di Pandesari, langsung berlari ke arah Pujon Lor untuk mencari pertolongan. Tetapi pasukan Belanda yang datang dari Utara menembaki mereka. Akibatnya, dua polisi keamanan, AP Kacung Permadi dan AP Suyadi, tewas, sementara AP Peril, Serma Suwarno Yudho dan seorang polisi bernama Poninten terluka parah karena ditembak dan terkena pecahan mortir (Kharisma, 2016).

KESIMPULAN

Agresi militer yang terjadi dalam waktu 2 tahun merupakan salah satu bentuk ambisi Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Karena ketika Belanda menyerahkan kekuasaan ke Jepang pada tahun 1942, banyak aset / faktor produksi Belanda masih beroperasi. Kekalahan Jepang dalam perang Asia Timur Raya, yang mengakibatkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tidak sepenuhnya dapat diterima oleh Belanda. Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure, sehingga Belanda merasa masih memiliki hak atas Indonesia dan asetnya tertinggal. Perlawanan demi perlawanan muncul di berbagai daerah, termasuk wilayah Batu-Pujon. Pasukan TNI yang masih dibakar oleh semangat kemerdekaan terus berjuang menggunakan persenjataan dan strategi. Namun perjuangan itu tidak berhenti meski Agresi Militer Belanda sudah berakhir, hari ini para pemuda yang melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan terus belajar dan memahami sejarah. Sejarah tidak ditulis karena imajinasi, tetapi sejarah ditulis karena

peristiwa yang meninggalkan jejak, dan itu adalah jejak semangat kemerdekaan yang tetap dan dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1985). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Achmad, S. (2019). *Pariwisata di Hindia-Belanda (1891-1942)*. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Amato, J. A. (2002). *Rethinking Home: A Case for Writing Local History*. University of California Press.
- Aminullah, Z. (2006). *Peranan Masyarakat Junrejo Pada Masa Perang Kemerdekaan 1948-1949* [Thesis]. Universitas Negeri Malang.
- Anwar, R. (2010). *Napak Tilas ke Belanda: 60 tahun Perjalanan Wartawan KMB 1949*. Penerbit Buku Kompas.
- Cahyono, D. M. (2011). *Sejarah Daerah Batu: Rekonstruksi Sosio-Budaya Lintas Masa*. Jejak Kata Kita.
- Carr, E. H. (2018). *What is History?* Penguin UK.
- de Leeuw, K. (2015). The Institution of Modern Cryptology in the Netherlands and in the Netherlands East Indies, 1914–1935. *Intelligence and National Security*, 30(1), 26–46. <https://doi.org/10.1080/02684527.2013.867223>
- Djamhari, S. A. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Balai Pustaka.
- Drakeley, S. (2005). *The History of Indonesia*. Greenwood Press.
- Efimova, L. M. (1998). Towards the Establishment of Diplomatic Relations Between the USSR and The Republic of Indonesia, 1947–48. *Indonesia and the Malay World*, 26(76), 184–194. <https://doi.org/10.1080/13639819908729922>
- Farram, S. (2020). Australia and the 1947 United Nations Consular Commission to Indonesia. *The European Legacy*, 25(5), 535–553. <https://doi.org/10.1080/10848770.2020.1751954>
- Frakking, R. (2017). ‘Gathered on the Point of a Bayonet’: The Negara Pasundan and the Colonial Defence of Indonesia, 1946–50. *The International History Review*, 39(1), 30–47. <https://doi.org/10.1080/07075332.2016.1214611>
- Gottschalk, L. (1969). *Understanding History: A Primer of Historical Method*. Knopf.
- Groen, P. M. H. (1986). Dutch Armed Forces and the Decolonization of Indonesia: The Second Police Action (1948–1949), A Pandora’s Box. *War & Society*, 4(1), 79–104. <https://doi.org/10.1179/106980486790303862>
- Krekhof, J. V. D. (2005). Dutch Enterprise in Independent Indonesia: Cooperation and Confrontation, 1949-1958. *The Newsletter*, 36(1), 1–18.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Benteng Pustaka.
- Nasution, A. H. (1977). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 3: Diplomasi Sambil Bertempur*. Angkasa.
- Nopyansyah, P., Sair, A., & Farida. (2018). Peranan Perwira Gyugun dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Palembang Pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(2), 60–74.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern*. Serambi Ilmu.

- Scagliola, S. (2007). The Silences and Myths of a 'Dirty War': Coming to Terms with the Dutch-Indonesian Decolonisation War (1945-1949). *European Review of History: Revue Européenne d'histoire*, 14(2), 235-262. <https://doi.org/10.1080/13507480701433901>
- Schaff, A. (1976). *History and Truth* (1st ed). Pergamon Press.
- Sholihana, A. (2013). *Perjuangan Polri di Tlogowaru-Malang 1945-1947* [Thesis]. Universitas Negeri Malang.
- Sulistyo, Wahyu Djoko, Nafi'ah, U., Agung, D. A. G., & Cahyono, D. M. (2019). *Jejak Sejarah Malang Raya*. CV Bintang Sejahtera.
- Utama, A. P. (2008). *Peranan Laskar BPRI (Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia) Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Di Batu Jawa Timur 1947-1949* [Thesis]. Universitas Negeri Malang.
- van der kroef, J. M. (1953). Dutch Policy and the Linggadjati Agreement, 1946-1947. *The Historian*, 15(2), 163-187. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6563.1953.tb00146.x>
- Vickers, A. (2005). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Wicaksono, H. (2012). *Revolusi fisik di kota Malang tahun 1945-1949/ Helmi wicaksono* [Thesis]. Universitas Negeri Malang.
- Wiebes, C., & Zeeman, B. (1992). United States' 'Big Stick' Diplomacy: The Netherlands between Decolonization and Alignment, 1945-1949. *The International History Review*, 14(1), 45-70. <https://doi.org/10.1080/07075332.1992.9640607>
- Yusuf, S. (2016). Peran Residen Abdul Rozak Pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1), 96-101.